



පරිපාලන ප්‍රාන්තය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සිවිල් සේවය සහ පදිංචි කළමනාකරණ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
රාජ්‍ය සේවා සහ පදිංචි කළමනාකරණ (පදිංචි කළමනාකරණ) දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Tim Kerja	: Umum dan Kepegawaian
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82,85 Nilai
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan
Target Hasil Kegiatan	: 100 persen
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Keluaran Sub Kegiatan (Output):	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Target Output Sub Kegiatan	: 1 Laporan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Kegiatan ini merupakan sarana pendukung utama dalam memperlancar operasional kantor, yaitu air untuk membuat suasana kantor dan taman menjadi sejuk dan karena segala peralatan gedung kantor memerlukan energi listrik serta untuk memudahkan komunikasi secara vertikal maupun horisontal kedinasan memerlukan fasilitas telpon dan internet sehingga informasi dalam koordinasi tercapai secara efektif dan efisien.

2. Penerima Manfaat

Pertama-tama dan secara langsung menerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah semua bidang/bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Bekerja sama dengan pihak BUMN/BUMD melalui pembayaran iuran setiap bulan berdasarkan volume pemakaian.

- b. Tahapan dan Waktu pelaksanaan
Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

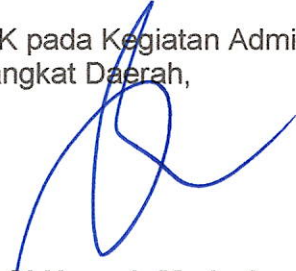
Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar
Rp. 174.800.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Bali, 2 Januari 2025

PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003

R A B
RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2025
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
1	BELANJA TAGIHAN TELEPON	30,000,000
2	BELANJA TAGIHAN AIR	4,800,000
3	BELANJA TAGIHAN LISTRIK	140,000,000
TOTAL		174,800,000

PPTK pada Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah,


Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa,M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003